

# FOKUS PERHATIAN

## PAHLAWAN PARA PAHLAWAN

Oleh : Aswino

Tiga bulan di Ujung tahun selalu penuh kenangan historik yang patriotik bagi bangsa Indonesia, yang selalu disertai dengan sebungkah harapan hidup lebih baik memasuki tahun-tahun baru.

Hari-hari penuh kenangan tersebut adalah Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, dan Hari Pahlawan 10 November. Sementara itu masih ada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober dan hari penting khusus kewanitaan yakni Hari Ibu 22 Desember, yang secara keseluruhan kita peringati setulusnya seakan-akan momentum yang berbeda tahun/jaman itu terasa seolah-olah berlangsung berantai dalam satu tahun yang berangkai. Dan dari semangat memperingatinya dengan tulus itu barangkali dapat dijamin bahwa semboyan/peribahasa yang berbunyi 'Hanya bangsa yang tahu menghargai pahlawannya akan menjadi bangsa yang besar' tidak akan deviatif menjadi slogan yang kosong.

### MAKNA KATA PAHLAWAN

Perry, pakar Bahasa Sanskrit da-

lam bukunya SANSKRIT PRIMER (halaman 206, 221) dan Lanman yang seprofesi dalam bukunya A SANSKRIT READER (halaman 199) menyatakan bahwa PHALAVANT berarti 'fruitful, yielding good results' atau berjasa besar serta mempersembahkan hasil guna yang baik. Mantan pengajar-pengajar kita Prof. Dr. J.G. de Casparis, Dr. Pitono, dan lain-lain pun memberikan makna demikian. Kemudian Prof. Moh. Zain, yang bersama dua orang ahli/pakar perkamusan (prof. W.J.S. Poerwadarminta dan Prof. Drs. Soewojo Wojowasito) yang pada Kongres Bahasa yang lalu menerima Piagam Penghargaan dari Mendikbud, memberi pengembangan makna dari pahlawan sebagai "Pemimpin yang gagah berani, kepala segala hulubalang, marsekal da dalam peperangan, prajurit yang tak takut mati, . . ."

Sementara itu secara universal (dalam ensiklopedia) disebutkan bahwa 'Seseorang disebut HERO karena memiliki keberanian, sikap kekesatriaian, bobot moral dan kecerdasan, ataupun sumbang

jasa yang luar biasa, baik demi perbaikan kemajuan nasib orang banyak maupun demi sekelompok masyarakat tertentu. Maka itu tampillah pengakuan dunia atas kepahlawanan sesuai dengan bidang keahliannya seperti Socrates (pemikiran), Galileo (ilmu pengetahuan), Florence Nightingale (kesehatan/palang merah), Churchill (kenegaraan), Joan of Arc (kehandalan prajurit), Leonardo da Vinci (seni), dan sebagainya.

Lahirnya seorang pahlawan berikutan kepahlawanannya ditentukan oleh budaya dan pendapat umum kurun jamannya, pengakuan yang didukung oleh tolok ukur/parameter/sistem nilai, serta oleh semacam kesepakatan bersama. Oleh sebab itu makna pahlawan telah berkembang luas sedemikian rupa sehingga lahir berbagai istilah seperti 'Sok jadi pahlawan', 'Pahlawan kesiangan', 'Pahlawan tanpa tanda jasa'; sebuah kondisi yang kurang menguntungkan hakekat kepahlawanan. Sinyalemen atas kondisi ini mendorong Pemerintah untuk mengeliminir kemungkinan adanya pengembangan makna yang di dalamnya tidak tertutup adanya upaya untuk memanipulir predikat/gelar Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan sebagainya.

Untuk menangkap hal-hal yang tidak kita kehendaki maka pembakuan kualifikasi, pengakuan, dan pengukuhan predikat/gelar yang

kita muliakan tersebut ditangani oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Direktorat Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan Departemen Sosial RI.

Salah satu ungkapan kekuatiran akan mungkin adanya manipulasi tersebut Pitut Suharto dalam harian MERDEKA tgl. 12-11 1988 menuliskan judul 'Menghayati Perjuangan Kemerdekaan' yang menyatakan bahwa WUJUD LANJUT DARI SIKAP KEPAHLAWANAN BANGSA INDONESIA INI PASTUTLAH KITA DALAMI, BAGI MEREKA YANG TIDAK SEMPAT MENGALAMI MASA PERJUANGAN BANGSA ANTARA HIDUP DAN MATI; TERUTAMA BAGI MEREKA YANG MENGABAIKAN NILAI-NILAI KEBERSARAN PERJUANGAN PAHLAWANNYA, YANG SEJAK AWAL PERJUANGAN BANGSA DI MASA LALU, SELALU BERADA DI TENGAH-TENGAH KENIKMATAN BERSAMA PENJAJAH, MERENDAHKAN PEJUANG BANGSA SENDIRI YANG KEMUDIAN TANPA MALU-MALU BERTERIAK SEBAGAI SEORANG PAHLAWAN KESIANGAN.

Jadi jelas bahwa ada pahlawan yang asli dan sejati tetapi ada pula yang palsu atau setidaknya tidaknya diwarnai oportuniste pribadi atau golongannya. Bangsa Indonesia sudah cukup berpengalaman dan ber-

dasarkan semboyan 'Jangan dua kali kehilangan tongkat' maka pengakuan gelar/predikat Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, juga Proklamator bagi Bung Karno dan Bung Hatta, dan seterusnya akan lebih dilandasi kualifikasi serta persyaratan yang mantap dan baku/resmi.

Sementara itu keawaman (kekurang-tahuan) akan makna kata pahlawan dan kepahlawanan perlu lebih dijernihkan serta disebarluaskan, sekaligus menyertai program Pemerintah dalam memerangi kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan sesuai JALUR-JALUR PEMERATAAN yang dalam hal ini PEMERATAAN DI BIDANG PENDIDIKAN. Dengan demikian peringatan hari-hari nasional tidak akan diisi dengan acara seremonial belaka namun disertai dengan kedalaman penghayatan akan sifat kepahlawanan mereka yang telah mendahului kita, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Gerak jalan tradisional Jakarta-Bogor sejauh sekitar 60 Km yang diselenggarakan tanggal 26 - 27 November 1988, diprakarsai oleh Persatuan Gerak-Jalan Jakarta (PGJ) bersama Direktorat Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, dengan tema yang dikaitkan dengan adanya Peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Sekiranya saja sarana gerak jalan tradisional yang sudah dilaksanakan 17 (tujuhbelas) kali

itu berhasil memasyarakatkan makna Hari Pahlawan kepada para atlet yang ribuan jumlahnya maka bangsa Indonesia tidak usah terlalu prihatin akan masa depan bangsanya. Mengenal makna hakiki kata pahlawan akan menumbuhkan rasa menghargai serta memuliakan jasa-jasa dan korbanan para pahlawan, yang sekaligus memotivisir untuk meneruskan berbuat baik yang bermanfaat. Kegiatan olahraga bukan satu-satunya media untuk membangkitkan rasa ingin punya jasa dan berkorban serta sekaligus punya makna bagi generasinya. Maka itu sudah saatnya penanaman jiwa patriotisme, kejuangan, dan kepahlawanan/heroisme dipikirkan untuk ditanamkan kepada generasi kini serta generasi pewaris yang akan datang, dengan penataan metoda yang sistematis. Diselenggarakan sedini mungkin serta menjelajah ke 8 (delapan) aspek kehidupan nasional yakni digali dari bidang geografi, demografi, sumber daya alam; ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta dalam aspek pertahanan keamanan dan kemiliteran. Sekiranya generasi pendahulu yang masih hidup berhasil menanamkan jiwa kepahlawanan yang proporsional tersebut baik dilihat dari sisi KEAMANAN maupun dari sisi KESEJAHTERAAN, maka pesimisme akan lunturnya Ketahanan Nasional bangsa Indonesia tidak perlu ada. Bahkan sebaliknya

nya, yang di dalam kehidupan kenegaraan yang membangun ini dimungkinkan lahirnya perintis-perintis dan penemu-penemu kemudahan kehidupan bangsa di semua bidang kehidupan sesuai dengan stratanya. Baik dalam lingkup 'discovery' ataukah yang mendekati lingkup 'invention'; yang satu merupakan penemuan dari yang sudah ada dihasilkan dengan cakrawala budi dayanya sedangkan yang terakhir merupakan penciptaan baru yang belum pernah terbayang akan ada sebelumnya.

### 'PAHLAWAN TANPA TANDA JASA'.

Penetapan dan pengukuhan Pahlawan serta Perintis Kemerdekaan memang telah berdasar hukum, akan tetapi masih ada identifikasi lain untuk menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawan. Di samping dari sisi formal dengan penetapan Pemerintah tersebut maka eksistensi Pahlawan dapat dilihat dari sisi faktual (dari pusara-pusara mereka di Taman Makam Pahlawan, Taman Bahagia, serta di makam-makam 'Pahlawan Tidak Dikenal'), sisi non formal dan informal, serta dari sisi non-faktual. Sebagaimana halnya banyak Pejuang Kemerdekaan/Perintis Kemerdekaan yang menolak dengan halus predikat Pejuang dan Perintis, maka adalah hak asasi mereka apabila banyak pula yang berkeberatan

menerima sebutan pahlawan.

Di atas segalanya baik yang 'menerima' ataupun yang 'berkeberatan' dikukuhkan maka para pahlawan sejati pada hakekatnya telah memenuhi tuntutan jaman masing-masing, terutama tuntutan mendasar yang kira-kira searti dengan Ucapan Inagurasi Presiden John Fitzgerald Kennedy tahun 1961 yang berbunyi ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU - ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY.

'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' judul lagu komponis terkenal Si-manungkalit dimaksudkan untuk mengenang abadi jasa-jasa serta kemuliaan korbanan para Guru. Akan tetapi dampak deviatif yang menyimpang ekstrim dapat muncul seakan-akan PENGORBANAN PROFESIONALISME PENGAJAR/PENDIDIK YANG TANPA PAMRIH bagaimanapun harus diberi balas jasa, di antaranya Tanda-Tanda Jasa. Tentunya tidak demikian, dan di mata penulis masalah tanda jasa bukan merupakan permasalahan pokok. Yang terpenting justru dengan lagu tersebut praktek-praktek profesionalisme guru/dosen yang lupa akan fungsi pengajaran sekaligus pendidikannya, lebih mawas diri.

Jadi dalam profesi lain pun ada 'pahlawannya yang tanpa tanda jasa' demikian. Termasuk di dalamnya para Sukarelawan dari

berbagai golongan, status, suku bangsa, ras Arab/Tionghoa/India, dan lain-lain yang terhimpun dalam nama dengan kredibilitas tinggi yakni AREK—AREK SURABAYA. Dan dari tulisan mantan Dubes RI di Perancis Prof. Dr. H. Tubagus Bachtiar Rifai dalam harian SUARA PEMBARUAN 9—11—1988 yang berjudul 'Pertempuran Surabaya Menurut Kesaksian Penulis India' secara kebetulan pertempuran hidup—mati, merdeka atau mati di Surabaya itu dimulai dari sporadis menjadi frontal sejak tanggal 28 Oktober 1945. Tanpa disadari aktualisasi perlawanan Arek-arek Suroboyo tersebut sespontan, senaluriyah, dan sejalan dengan perjuangan Pemuda-pemuda Pendahulunya 17 (tujuhbelas l) tahun sebelumnya. Tanda Jasa (medal of Honour) antar bangsa sudah bukan barang aneh. Akan tetapi agaknya perlu dipikirkan dan dikaji untuk menetapkan pemberian kehormatan kepada mereka Orang Asing yang sangat berjasa dalam periode bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.

### **IBU DAN KELUARGA.**

Keluarga adalah 'nucleus centre' yang menjadi ujung tombak aktualisasi serta tolok ukur/parameter berhasil tidaknya diciptakan rasa aman dan rasa sejahtera dalam lingkup Ketahanan Nasional tingkat

keluarga dan desa. Oleh sebab itu sikap tanggap Kepala Keluarga atas tantangan yang cenderung meningkat kompleks benar-benar mendesak. Apalagi oleh adanya kecenderungan yang makin faktual yakni semakin banyaknya para Ibu Rumah tangga ikut bekerja demi ikatan keluarganya, yang dengan demikian telah melahirkan pergeseran pembagian tugas dalam rumah tangga. Urusan bersih-membersihkan rumah, cuci mencuci, masak memasak, dan belanja membelanjakan gaji cenderung menjadi kewajiban bersama suami dan isteri. Secara teoritis dan penalaran realisasi semboyan klasik 'Duduk sama rendah berdiri sama tinggi' antara pria dan wanita Indonesia sudah mendekati kenyataan. Baik di pedesaan, daerah transisional, maupun di perkotaan. Namun demikian, khususnya karena jumlah keluarga terbesar berada di pedesaan maka sinyalemen Dr. Nyonya Astrid Susanto dalam harian KOMPAS tanggal 15—11—1988 yang menyatakan bahwa WANITA BELUM JADI MITRA SEJAJAR PRIA, masih patut kita berikan respons yang tepat.

Sementara itu Pramudito dalam KOMPAS tanggal 31—10—1988 menulis betapa pentingnya pemuda-pemudi sebagai pewaris dan penerus perjuangan bangsa dalam judul 'Pemuda dan Momentum-momentum Sejarah'.

Identifikasi Pramudito tersebut

bukan barang baru akan tetapi karena dihadapkan momentum pergeseran pelaksanaan tugas/hak-ke-wajiban wanita dan pria dalam keluarga maka masalahnya menjadi serius untuk ditata ulang. Apalagi bila kita kaitkan dengan tulisan psikolog Prof. Dr. Saparinah Sadli di harian SUARA PEMBARUAN tanggal 5-10-1988 dalam judul tulisannya 'Heidi - Alvin Toffler Model Suami-Isteri GELOMBANG KETIGA ?' Terkesan bahwa penulis mengidamkan dan sekaligus mengisyaratkan perlunya antisipasi bahwa setiap pasangan suami-isteri Indonesia di era industrialisasi sejak sekarang ini segera mempersiapkan diri menjadi mitra-mitra yang DEMOKRATIS (sedemokratis pasangan futurolog Toffler, penulis).

Dari hakekat tantangan yang dihadapi keluarga kini dan yang akan datang adalah bagaimana Suami-Isteri/Ibu-Bapak dalam setiap keluarga mampu mengadaptasikan diri di tengah kemajuan dan pergeseran nilai-nilai, untuk kemudian mengantisipasinya dengan tepat mendewasakan, meneruskan nilai-nilai luhur kepahl-

wanan/heroisme, serta memandirkannya sebagai Pewaris Penerus yang berkepribadian. Isteri/Ibu rumah tangga harus terbebas dari predikat-predikat konvensional seperti 'Tiyang wingking' (Orang belakang, orang dapur), 'Wanita adalah perhiasan sangkar madu', ataupun 'Swarga nunut naraka katur' (Ke surga maupun ke neraka sekedar ikut pria/suami). Suami-isteri harus sederajat ('equal').

Tanggal 22 Desember para Ibu kembali memperingati Hari Ibu. Identitas Wanita sesuai kultur kodratnya pasti segera mengkrystal, sementara itu di bumi pertiwi ini telah lahir PAHLAWAN-PAHLAWAN KUSUMA BANGSA dari gua garba/rahimnya. Kaum Ibu yang telah mendewasakan putra-putrinya tidak pernah menuntut balas jasa, apalagi Tanda Jasa. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa KAUM IBU ADALAH 'PAHLAWAN PARA PAHLAWAN'

..... Selamat ber-Hari Ibu !

Jakarta, medio November 1988.



# RUANG PUSTAKA

## PERPUSTAKAAN POLRI

Angkatan Bersenjata RI. Markas Besar Kepolisian RI  
Almanak Kepolisian RI 1988 — 1990.— Jakarta: Dutarindo ADV, 1988  
715 hal. : 21 cm.

Almanak ini disusun oleh suatu Tim yang dipimpin oleh Brigadir Jendral Polisi H. Hadiman. Merupakan media informasi baik untuk Polri maupun masyarakat bukan Polri. Memuat antara lain gambaran tentang kebijaksanaan dan strategi optimasi — dinamisasi Polri, Kode Etik Kepolisian, istilah Abri/Polri dan sejarah perkembangan Polri.

Angkatan Bersenjata RI. Markas Besar Kepolisian RI

Keputusan Bersama PJKA — Mabes Polri mengenai Rapat Koordinasi Penanggulangan Terpadu Gangguan Kamtibmas di Lingkungan PJKA.

Nomor : KA/UM/1386/SK/87

No. Pol : Skep/03/1/87

tentang Pola Penanggulangan Kamtibmas di Lingkungan PJKA.  
— Cisarua — Bogor : 1986  
19 hal. : 21 cm.

Keputusan bersama ini melampir-

kan perumusan berupa matriks penanggulangan terpadu gangguan Kamtibmas dilingkungan PJKA, untuk dilaksanakan di lapangan. Diusulkan mengadakan pemantauan atas pelaksanaannya dan rapat evaluasi setiap 6 bulan untuk penyempurnaan langkah-langkah selanjutnya.

Angkatan Bersenjata RI. Markas Besar Kepolisian RI

Keputusan Bersama PJKA — Mabes Polri mengenai Hasil Rapat Koordinasi II PJKA, Mabes Polri dan Instansi Yang Terkait.

Nomor :

KA/UM/34716/SK/88

Pol./SKep/536/VII/88

tentang Pola Penanggulangan Kamtibmas di Lingkungan PJKA.  
— Cisarua — Bogor : 1988  
12 hl. : 21 cm.

Keputusan Bersama ini melampirkan pola penanggulangan gangguan Kamtibmas di lingkungan PJKA berupa matriks yang terdiri atas : pokok masalah, uraian masalah serta penanggulangannya.

Angkatan Bersenjata RI. Markas Besar Kepolisian RI

Surat Edaran No.Pol. SE/10/IX. 1984 tentang masalah Alat-

alat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Pengaman. —

Jakarta : Mabes Polri, 1984  
16 hal. : 21 cm.

Buku ini memberikan pengertian, fungsi Kepolisian, syarat pengangkatan Alat-alat Kepolisian khusus; Penyidik Pegawai Negeri; Satuan Pengaman (Satpam). Bagaimana hubungan kerja antara Polri dengan Alat-alat Kepolisian; Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri. Perbedaan prinsipil dalam pelaksanaan kegiatan antara : Alat-alat Kepolisian Khusus dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Alat-alat Kepolisian Khusus dengan Satuan Pengaman (Satpam).

Citra Polisi. Penyunting Mochtar Lubis. Penerjemah S. Maimun. Ed. 1. — Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988  
192 hal. : 21 cm.

Peranan polisi dan hukum yang canggih dibutuhkan oleh masyarakat modern untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup manusia. Buku Citra Polisi dengan kata pengantar yang disusun oleh Harsya W. Bachtiar, memuat hasil kajian berupa kumpulan karangan tentang Kepolisian antara lain : Koban, suatu

sistem operasi Kepolisian di daerah perkotaan di Jepang; Bangsa dan Polisi; kekuasaan dan pertanggungjawaban Polisi; masalah narkotik dan karya Satjipto Rahardjo mengenai Polisi dan Masyarakat Indonesia.

Sitompul, DPM

Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu bunga rampai)/ oleh DPM Sitompul & Edward Dyahperenong. — Bandung : Tarsito, 1985 VI, 155 hal. : 21 cm.

merupakan bunga rampai kumpulan karya/pengkajian masalah Hukum Kepolisian. Memuat karya Drs. Soebroto Brotodirdjo SH tentang : Hukum Kepolisian di Indonesia, Polri sebagai penegak hukum, ruang gerak Polri. Kemudian Memet Tanumidjaja SH menulis latar belakang dan motivasi penetapan status polisi sebagaimana tercantum dalam UU Pokok Kepolisian dan tulisan lainnya yaitu resiko dan pertanggungjawaban polisi oleh Drs. DPM Sitompul SH.

Hodges, John C.

Harbrace college handbook 1984 printing. With the new MLA documentation style/By John C. Hodges and Mary E. Whitten. — San Diego : Har-



court Brace Jovanovich, 1984.  
XXII, 586 hal. : 18 cm.

Merupakan acuan atau refrens  
sebagai pegangan untuk penulis  
dan teksbook untuk dikelas.

Memuat grammar, mechanics,  
tanda baca, effective sentences,  
research paper dan business  
writing.



PT. MONODON KENCANA	: Shrimp Culture & Aquaculture Consultants
PT. MINA MAS UTAMA	: Cold Storage
PT. MINA KARYA UTAMA	: Hatchery.
PT. CENTRAL JAVA COLD STORAGE	: Cold Storage.
PT. SURYA BAROKAH	: Contractor & Supplier

**Mengucapkan :**

**HUT ABRI 5 OKTOBER 1988**

1. President Komisaris	- Soemitro
2. Wk. President Komisaris	- Drs. Tj. Soegiono S. M.P.A.
3. President Direktur	- Adisurya Gerdyman

Head Office : Jl. Kedungdoro No. 66 - 68 SURABAYA INDONESIA  
Telp. : 471680 - 471852 - 511961 - 511708 Fax 511960 Telex 31848 MATA IA